

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah dan tinggi derajatnya. Mereka diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di permukaan bumi bahkan di seluruh alam ciptaan Tuhan. Untuk dapat mencapai derajat manusia yang paling indah dan paling tinggi itu maka setiap individu yang lahir ke dunia memerlukan pengasuhan, pembinaan dan pengembangan melalui upaya-upaya pendidikan sehingga segenap potensi yang dibawanya sejak lahir itu berkembang secara optimal.

Di negara kita Republik Indonesia tercinta ini tugas pengasuhan, pembinaan, dan pengembangan melalui pendidikan tersebut tercermin dalam TAP MPR No. II/MPR/ 1993 yaitu pada Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 sebagai berikut :

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkeperibadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Dalam rangka mengembangkan potensi individu secara optimal tersebut, layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keseluruhan upaya pendidikan khususnya di lembaga-lembaga sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Tuntutan akan perlunya layanan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli.

Schman Natawidjaja (1990:16) menyatakan sebagai berikut:

Bimbingan dan konseling memiliki fungsi dan posisi kunci dalam pendidikan di sekolah yaitu sebagai pendamping fungsi utama sekolah dalam bidang pengajaran dan perkembangan intelektual siswa dalam menangani ihwal sisi sosial pribadi siswa.

Lebih lanjut MD. Dahlan (1988:26-27) mengemukakan etapa pentingnya pelayanan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan. Beliau mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut.

...bimbingan penyuluhan selalu merupakan momen Ilmu Mendidik... ilmu pendidikan dan bimbingan penyuluhan sebagai hal-hal yang esensial untuk umat manusia masa kini dan masa mendatang. Dalam kerangka pemikiran itulah dapat ditandaskan betapa disiplin ilmu mendidik dan bimbingan dan penyuluhan mendapat tempat yang bukan saja wajar, akan tetapi bahkan esensial dalam pendidikan.

Sebenarnya jauh sebelum kedua ahli di atas mengemukakan bagaimana peranan bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan, Mortensen dan Schmuller (1964:7) telah menyatakan bahwa ada tiga bidang kegiatan proses pendidikan di lingkungan persekolahan yang saling kait mengait. Ketiga bidang itu adalah : (1) bidang administrasi dan supervisi; yang wujud nyatanya dalam bentuk penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan supervisi di sekolah oleh kepala sekolah, guru, pegawai, dan pihak-pihak lain yang terkait, 2) bidang kurikuler; yang wujud nyatanya melalui penyelenggaraan mata-mata pelajaran, dan (3) bidang bimbingan; yang wujud nyatanya berupa pemberian layanan bantuan kepada siswa-siswa dengan memperhatikan berbagai kemungkinan dan kenyataan tentang adanya masalah, baik di dalam dua bidang kegiatan pendidikan di atas atau masalah lain di luar bi-

dang tersebut. Bahkan Belkin (1975:437) mengemukakan tiga sumbangan pelayanan bimbingan dan konseling itu terhadap upaya pendidikan di sekolah. Ketiga sumbangan yang dimaksudkan adalah :

- a. Memberi kesempatan dalam memperkaya dan menumbuhkan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuannya secara penuh.
- b. Menyajikan intervensi dengan kekuatan terapeutik sehingga dapat mengatasi gangguan-gangguan dan kekuatan-kekuatan yang melawan produktifitas serta yang menghambat pendidikan
- c. Menyediakan suatu pelayanan kelompok bagi guru-guru, siswa-siswa, dan para administrator yang di dalamnya termasuk kegiatan penilaian, pemberian informasi, referal, dan sebagainya.

Dalam sistem pendidikan di negara kita pelayanan bimbingan dan konseling yang bersifat terpadu ke dalam sistem pendidikan tersebut telah dirintis dan dikembangkan selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir ini (Prayitno, 1990:1). Usaha-usaha yang bersifat rintisan telah dimulai sejak tahun 1960-an, sewaktu didirikannya jurusan BP di FKIP-UNPAD Bandung, yang kemudian diikuti oleh gerakan memasukkan program layanan bimbingan dan konseling ke sekolah-sekolah jenjang SMA. Selanjutnya usaha yang bersifat rintisan itu secara lebih gencar dikembangkan melalui dimasukkannya pelayanan bimbingan dan konseling ke dalam kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pada dua jenis kurikulum tersebut, layanan bimbingan dan konseling telah benar-benar menjadi bagian yang integral dengan kesemua upaya pendidikan di sekolah, mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas.

Pada saat sekarang keberadaan bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan telah dipertegas oleh kekuatan yang

bersifat hukum. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( pasal 1 ayat 1 ) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan para peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa datang. Upaya pendidikan berdasarkan pengertian Undang-undang tersebut mencakup bidang yang amat luas dalam rangka pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam cakupannya yang amat luas itu, upaya pendidikan secara menyeluruh meliputi tiga bidang kegiatan yang saling mengait, yaitu bidang bimbingan, pengajaran dan latihan. Suatu upaya pendidikan yang menyeluruh, lengkap, dan mantap harus meliputi secara terpadu ketiga bidang yang dimaksudkan.

Selanjutnya berbagai perangkat peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut, menjadikan pelayanan bimbingan dan konseling benar-benar merupakan suatu tuntutan yang perlu diwujudkan dalam setiap upaya pendidikan di sekolah-sekolah. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1990 Bab X ayat 1, 2 dan 3 mengemukakan secara tegas perlunya pelayanan bimbingan dan konseling itu untuk Pendidikan Dasar, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 pada Bab dan ayat yang sama, juga mengungkapkan persoalan serupa untuk Pendidikan Menengah . Bab X dari kedua PP itu berbunyi :

- (1). Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan
- (2). Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing

- (3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas diatur oleh Menteri.

Kekuatan hukum lain yang juga merangsang dilaksanakannya tugas pelayanan bimbingan dan konseling itu secara mantap di sekolah-sekolah adalah keluarnya SK MENPAN No. 26/19-89 tentang Angka Kredit Jabatan bagi Guru. Dalam SK yang dimaksudkan, dinyatakan bahwa tugas mengajar setara dengan tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan. Meskipun di dalam SK itu tidak dinyatakan secara tegas siapa yang berhak dan berwenang melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan tersebut, namun setidaknya memberi peluang yang cukup besar terhadap terselenggaranya proses layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah kita.

Sebagai suatu bagian yang terpadu dengan kegiatan pendidikan, pelayanan bimbingan dan konseling memuat sejumlah jenis-jenis layanan dan kegiatan dalam rangka membantu pengembangan potensi siswa secara optimal. Jenis-jenis layanan yang dimaksudkan adalah layanan orientasi, informasi, diagnostik kesulitan belajar, pengajaran perbaikan, bimbingan kelompok, dan layanan konseling ( Prayitno, 1993, Moh. Surya, 1988, dan Rochman Natawidjaja, 1984 ).

Layanan konseling merupakan bentuk khusus dari berbagai layanan bimbingan tersebut di atas. Dia juga disebut dengan pelayanan inti dari semua jenis layanan bimbingan yang dimaksudkan. Sifat khusus dan inti layanan konseling terletak pada hubungan langsung tatap muka antara konselor dengan klien dalam rangka pengembangan diri dan/atau pengentasan masalah klien yang bersangkutan. Begitu khususnya

layanan konseling tersebut, Mortensen dan Schmuller (1964:30), dan Gibson dan Mitchel (1981:27) menyebutnya dengan : ".... the heart of guidance program", selanjutnya Miller dan kawan-kawan (1978:15) menyebut konseling itu sebagai otak dan jantung hatinya program bimbingan, sementara Borders dan Drury (1992:487) menyebutnya sebagai " the sine qua non of school counseling programs".

Ungkapan "jantung hati" terhadap layanan konseling di atas menurut penulis mengandung berbagai implikasi terhadap layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Pertama, layanan konseling harus dilakukan secara profesional oleh tenaga-tenaga yang berkompeten. Artinya layanan konseling harus dilakukan secara teratur, terarah dan tidak diselenggarakan secara acak atau apa adanya saja. Tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan suasana yang tercipta, dan metodologi penyelenggaraan di dalam layanan konseling itu perlu mengikuti aturan-aturan yang jelas dan bersifat baku (Prayitno, 1993:514-515).

Implikasi kedua dari label "jantung hati" terhadap layanan konseling di atas adalah bahwa apabila seorang konselor telah memahami, menghayati dan menerapkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan berbagai teknik layanan konseling tersebut, maka dapat diharapkan ia akan dapat menyelenggarakan layanan bimbingan lainnya dengan tidak mengalami kesulitan. Keadaan ini dapat dimengerti karena layanan konseling yang tuntas telah mencakup semua fungsi-fungsi yang terdapat dalam bimbingan seperti fungsi pemahaman, pence-



gahan, pemecahan, pemeliharaan, dan pengembangan (Prayitno, 1993:515).

Tuntutan akan pentingnya pelayanan konseling sebagai kegiatan yang terpadu dengan upaya pendidikan di sekolah, memerlukan tersedianya tenaga-tenaga kependidikan yang benar-benar dapat mencurahkan segenap perhatian dan tenaganya untuk kepentingan layanan yang dimaksudkan. Salah satu tenaga kependidikan yang sangat peduli dengan layanan bimbingan dan konseling tersebut di sekolah-sekolah adalah Konselor Sekolah (dalam PP No. 28 dan PP No. 29 tahun 1990 disebut dengan Guru Pembimbing). Para konselor sekolah ini telah menjalani pendidikan pada jenjang D3 dan S1 pada Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Program Studi Bimbingan dan Konseling di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (IKIP, FKIP dan STKIP). Dalam lembaga tersebut, mereka telah belajar berbagai konsep, teori, dan teknik-teknik berkenaan dengan layanan konseling itu khususnya dan berbagai jenis layanan bimbingan lainnya pada umumnya. Dengan demikian secara teoritis para konselor ini harusnya telah mampu dan terampil menyelenggarakan layanan konseling tersebut kepada siswa-siswa di sekolah. Dengan memperhatikan uraian-uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya pelayanan bimbingan dan konseling itu di sekolah banyak tergantung kepada tenaga kependidikan yang disebut dengan konselor sekolah tersebut.

Masalahnya sekarang adalah bahwa keberadaan para konselor (sebagaimana tuntutan di atas) belum mendapat sambutan yang menggembirakan (Prayitno, 1989:10). Orang tua belum

banyak yang memahami peran layanan bimbingan dan konseling, guru-guru juga belum banyak mendukung kegiatan layanan yang dimaksudkan, bahkan kepala sekolah banyak yang memberikan makna terhadap layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk penegakan disiplin kepada siswa-siswa. Persoalan ini mungkin disebabkan oleh karena pelayanan konseling masih terbatas pada pelayanan terhadap kasus-kasus yang "menonjol" saja seperti kenakalan siswa, tidak membayar SPP, mencuri, membolos dan sejenisnya. Lebih lanjut Prayitno (1992:8) mensinyalir bahwa pelayanan terhadap kasus-kasus tersebut di atas seringkali masih bersifat "negatif-antagonistik", yaitu suatu sikap yang memandang masalah-masalah yang dialami siswa sebagai suatu hal yang tidak boleh ada, harus diberantas dengan segera dan jika perlu dengan kekerasan.

Berdasarkan pengamatan penulis selama menjadi pembimbing mahasiswa dalam melaksanakan praktek lapangan bimbingan dan konseling di berbagai SMA Kota madia Padang, dialog dengan beberapa guru, kepala sekolah dan para siswa diperoleh suatu kesan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling itu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh warga sekolah. Kebanyakan guru masih banyak yang menganggap bahwa konselor sekolah "bernasib baik" karena mereka tidak perlu berada di sekolah selama jam sekolah, tidak perlu menyiapkan materi-materi yang perlu diajarkan kepada siswa, dan memeriksa tugas-tugas yang mereka kerjakan. Mereka lebih banyak ditugasi mengurus pekerjaan yang mudah-mudah saja seperti mengurus absensi, memungut SPP, atau hanya mengajar Bimbingan



Karir. Para siswa banyak yang menganggap guru BP (konselor) mereka sebagai orang yang perlu diwaspadai, karena salah-salah sedikit mereka bisa mendapat sanksi, atau surat panggilan orang tua dari guru BP. Para siswa di sekolah banyak yang telah terlanjur menganggap konselor sekolah sebagai sosok yang menakutkan.

Isu tentang ketidakandalan konselor sekolah juga bergema di tempat-tempat lain, dan dikemukakan oleh para ahli yang berkepentingan dengan profesi tersebut. Konselor sekolah tidak siap pakai (Munandir, 1986:2), konselor sekolah dikatakan "polisi sekolah" (Prayitno, 1987:14), Kegiatan konselor memberikan "pelajaran bimbingan" (Rochman Natawidjaja, 1989:8), konselor sekolah sebagai petugas administrasi, pelaksana koperasi sekolah, pelaksana presensi, dan keranjang masalah (Thohari Musnamar, 1991:5), guru bimbingan sedang "tidur" (Prayitno, 1991, dalam Pelita 19 Nopember 1991, halaman 5), dan lain-lain lagi.

Dalam pada itu, berbagai temuan penelitian juga mengindikasikan belum mampunya konselor menampilkan kemampuan profesional mereka. Ambo Enre Abdullah (1991:5) dalam penelitiannya tentang unjuk kerja Guru BP di SMTP dan SMTA Sulawesi Selatan menemukan bukti bahwa pada umumnya guru BP (konselor) cenderung menangani siswa-siswa pembolos, mengurus absensi, dan menangani siswa-siswa yang malas membayar SPP/BP3. Mereka tampaknya lebih disibuki oleh urusan-urusan disiplin, dan terbatas dalam melakukan fungsi bimbingan dan konseling. Studi yang dilakukan oleh Bastiah Radam (1986:72) di SMA Negeri Samarinda menunjukkan masih baurnya tata kerja

konselor dengan guru bidang studi, sehingga kerahasiaan siswa belum dapat terjamin secara utuh. M. Asrori (1990:80) melalui penelitiannya terhadap unjuk kerja Petugas Bimbingan dalam melaksanakan konseling menemukan bahwa unjuk kerja Petugas Bimbingan baru dapat diklasifikasikan dalam kategori sedang, dan pada berbagai keterampilan seperti mengkonkritkan pembicaraan, membuka konseling, merumuskan tujuan, memberikan dorongan, merangkum hasil wawancara dan menutup konseling, belum memiliki kemampuan yang tinggi (garis bawah dari penulis). Begitu pula studi yang dilakukan oleh Abdul Murad (1992) tentang tingkat unjuk kerja konselor dalam menyelenggarakan wawancara konseling awal menemukan bukti bahwa sekalipun unjuk kerja para konselor tergolong tinggi, namun penampilan unjuk kerja tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan dengan unjuk kerja konselor yang bukan berasal dari Jurusan BP. Selanjutnya Dwi Yuwono (1992) melalui penelitiannya tentang profil unjuk kerja Guru Pembimbing SMA di Kota madia Semarang menemukan bahwa unjuk kerja mereka dalam melaksanakan jenis-jenis layanan bimbingan masih berada pada taraf sedang, bahkan dalam hal melaksanakan layanan penilain program bimbingan masih termasuk pada kategori rendah.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian dan isu-isu di atas, maka jelas sekali terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dari para konselor sekolah dengan apa yang ditemukan dalam kenyataan. Mereka (para konselor sekolah yang telah dipersiapkan untuk tugas tersebut) diharapkan dapat

menampilkan unjuk kerja profesionalnya yang mantap, namun kenyataannya mereka masih belum dapat membuktikan diri sebagai petugas yang profesional dalam bidangnya yaitu dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Berbagai pertanyaan dapat muncul dari keadaan tersebut di atas. Misalnya, bagaimana tingkat penguasaan para konselor terhadap berbagai konsep yang menyangkut dengan kemampuan profesionalnya itu? Bagaimana pula tingkat penerapan konsep yang telah mereka miliki itu terhadap tugas-tugas layanan bimbingan dan konseling di sekolah? Bila terdapat kesenjangan antara tingkat penguasaan konsep mereka dengan tingkat penerapan layanan konseling di sekolah, faktor-faktor apa yang menyebabkan keadaan itu?

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, kiranya perlu dilakukan suatu penelitian yang mendalam berkenaan dengan tingkat penguasaan konselor tentang konsep kemampuan profesional konseling dan penerapannya di sekolah, serta berbagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara kedua faktor tersebut.

#### **B. Masalah, Wilayah dan Pertanyaan Penelitian**

Masalah belum terwujudnya unjuk kerja profesional konselor secara baik di sekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Achmad Sanusi (1991:77-78) melihat persoalan itu dalam konteks ekologi perilaku profesional konselor, di mana di dalamnya tersangkut aspek-aspek (1) pengetahuan, keperibadian, pengalaman, keahlian, dan kemauan konselor, (2) karakteristik klien, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya,

(3) tuntutan sekolah, (4) organisasi profesi, dan (5) pihak-pihak lain yang terkait dengan perilaku profesional tersebut.

Penelitian ini ingin mengungkapkan masalah tingkat penguasaan konselor tentang berbagai konsep yang menyangkut kemampuan profesional konseling dan bagaimana penerapan konsep tersebut dalam praktek layanan konseling di SMA Kota madia Padang. Ditetapkannya layanan konseling perorangan dalam fokus penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa layanan tersebut adalah implikasi dari persyaratan suatu pekerjaan profesional konselor seperti yang dikemukakan oleh Mc Cully (1969:14), yaitu (1) dapat menampilkan pelayanan sosial yang unik sehingga jelas perbedaannya dengan pekerjaan tenaga lain, (2) untuk mendapatkan kemampuan tersebut diperlukan pendidikan dan latihan dalam periode waktu yang memadai, dan (3) para anggota yang termasuk ke dalam pekerjaan itu secara tegas dituntut memiliki kemampuan minimal melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan, serta lisensi atau pun sertifikasi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa satu-satunya keunikan pelayanan dari konselor adalah menyelenggarakan konseling perorangan (Mc Cully, 1969:16). Keadaan ini juga diperkuat oleh Nugent (1981:241) dengan menyatakan : " when counselors complete their internships in counseling, they just beginning professional".

Selanjutnya dipilihnya konselor SMA sebagai subjek penelitian didasarkan kepada beberapa alasan. Pertama, siswa-siswa merupakan kelompok remaja yang sedang mengalami

masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang tidak dapat terhindar dari berbagai masalah (Wren, 1962:5). Masalah-masalah umum yang dihadapi para remaja seusia siswa SMA menurut Shertzer dan Stone (1981:2-25) antara lain adalah : masalah-masalah transisi, identitas diri, ekonomis, sosial, dan pribadi. Masalah-masalah seperti itu seringkali tak dapat dihindari meski dengan pengajaran yang baik sekalipun (Prayitno, 1993:59). Oleh karenanya siswa-siswa usia ini memerlukan spesialis (konselor) yang dapat membantu mereka secara pribadi.

Alasan kedua adalah alasan yang bersifat strategis. Para konselor tamatan LPTK lebih banyak ditempatkan di Sekolah-sekolah Menengah Atas dibandingkan sekolah lainnya, sehingga penelitian terhadap kemampuan profesional mereka menjadi lebih beralasan.

Kemampuan profesional konselor dalam menyelenggarakan konseling perorangan terbentang luas mulai dari upayanya membangkitkan serta membahas perlunya bantuan kepada pihak klien sampai kepada evaluasi hasil serta pengakhiran proses tersebut. Brammer dan Shostrom (1982: 99) mengemukakan tujuh tahap yang perlu dilalui konselor dalam melakukan proses konseling tersebut yaitu (1) membangkitkan dan membahas perlunya bantuan, (2) membina hubungan, (3) menetapkan tujuan konseling dan menjelajahi berbagai alternatif yang ada, (4) bekerja dengan masalah dan tujuan-tujuan, (5) membantu dan mengembangkan kesadaran klien untuk dapat berubah, (6) merancang suatu tindakan tertentu, dan melakukan evaluasi

serta mengakhiri proses konseling. Carckhuf (1977:5) mengemukakan fase-fase bantuan yang perlu ada dalam proses konseling tersebut adalah (1) involving , (2) exploring, (3) understanding, dan (4) acting, di mana setiap fase tersebut diperlukan kemampuan profesional tertentu dari konselor. Untuk dapat membantu klien terlibat dalam proses bantuan konselor harus terampil menggunakan kemampuan attending, selanjutnya untuk membantu klien dapat menjelajahi berbagai pengalamannya konselor harus terampil menggunakan kemampuan responding, untuk membantu klien memahami dan mengerti diri dan lingkungannya dituntut kemampuan personalizing, dan akhirnya agar klien dapat melakukan berbagai tindakan yang dapat mengatasi masalahnya, konselor harus dapat menerapkan kemampuan initiating. Selanjutnya Munro, dkk (1979) secara garis besar, membagi proses konseling itu ke dalam empat tahapan yaitu (1) memulai hubungan konseling, (2) mengembangkan hubungan konseling, (3) melakukan usaha perubahan tingkah laku, dan (4) mengakhiri proses konseling.

Begitu luasnya kemampuan profesional yang perlu diperhatikan konselor dalam menyelenggarakan konseling perorangan tersebut maka pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sampai pada tingkat mana penguasaan konselor terhadap berbagai konsep tentang kemampuan profesional konseling yang mesti dimilikinya, khususnya dalam hal: melibatkan diri sendiri dan klien ke dalam suasana konseling, membantu klien mengeksplorasi dirinya, membantu klien memahami dirinya sendiri, membantu klien mengambil tindakan

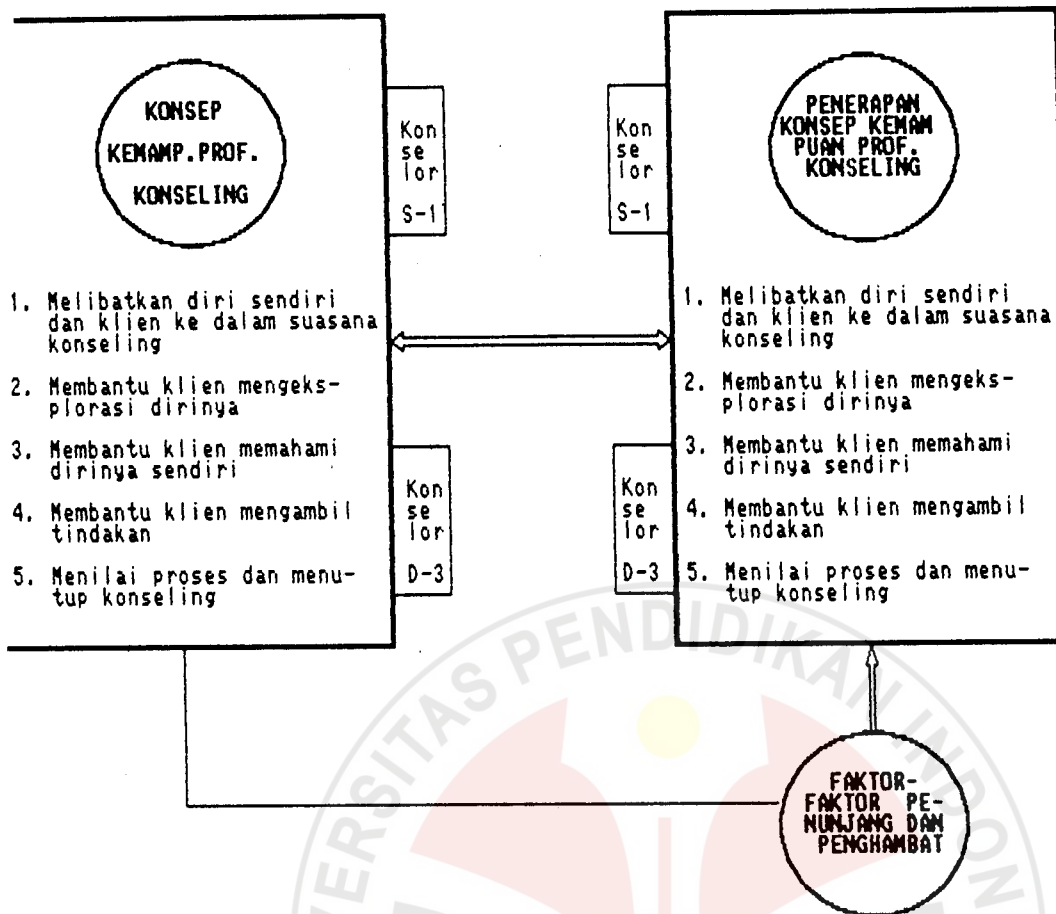


- untuk keperluan pencapaian tujuan konseling, dan menilai proses dan hasil konseling ?
2. Sampai pada tingkat mana penerapan konselor tentang berbagai konsep kemampuan profesional konseling seperti tersebut pada butir 1 di atas ke dalam praktek layanan bimbingan dan konseling di sekolah ?
  3. Apakah terdapat perbedaan tingkat penguasaan konsep kemampuan profesional konseling antara konselor yang berkualifikasi pendidikan S-1 dengan konselor yang berkualifikasi pendidikan D-3 ?
  4. Apakah terdapat perbedaan tingkat penerapan konsep kemampuan profesional konseling antara konselor yang berkualifikasi pendidikan S-1 dengan konselor yang berkualifikasi pendidikan D-3 ?
  5. Seberapa besar korelasi dan kontribusi penguasaan konsep kemampuan profesional konseling terhadap penerapan konsep tersebut ke dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah ?
  6. Faktor-faktor apa saja yang menunjang dan menghambat konselor dalam menerapkan konsep kemampuan profesional konseling ke dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah ?

Dengan memperhatikan pertanyaan penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi dua variabel pokok yang dilibatkan dalam penelitian ini, yaitu variabel penguasaan konselor tentang konsep kemampuan profesional konseling, dan variabel penerapan konsep tersebut dalam layanan konseling terhadap

penerapan konsep tersebut dalam layanan konseling terhadap siswa. Variabel pertama terdiri dari lima sub variabel yaitu konsep konselor tentang (1) pelibatan diri sendiri dan klien dalam suasana konseling, (2) eksplorasi diri klien , (3) pemahaman diri klien, (4) pengambilan tindakan oleh klien, dan (5) penilaian serta penutupan konseling. Variabel kedua juga berisikan lima sub variabel yaitu penerapan konselor tentang konsep kemampuan profesional konseling di atas yaitu kemampuan dalam hal (1) melibatkan diri sendiri dan klien ke dalam suasana konseling, (2) membantu klien mengeksplorasi dirinya, (3) membantu klien memahami dirinya sendiri, (4) membantu klien mengambil tindakan, dan (5) menilai proses serta menutup konseling. Di samping itu masih ada satu variabel pelengkap dari ke dua variabel di atas yaitu variabel tentang faktor penunjang dan penghambat penerapan konsep kemampuan profesional konseling.

Untuk lebih jelasnya bagaimana hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat pada gambar 1 halaman berikut ini.



Gambar: 1 Hubungan antar variabel penelitian

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan-masukan yang berharga terhadap peningkatan unjuk kerja profesional para konselor di SMA Negeri Kota madia Padang. Untuk maksud tersebut perlu diukur, dideskripsikan, dan dianalisis bukti-bukti empirik tentang :

1. Tingkat penguasaan konselor terhadap berbagai konsep tentang kemampuan profesional konseling yang mesti di-

milikinya, khususnya dalam hal: melibatkan diri sendiri dan klien ke dalam suasana konseling, membantu klien mengeksplorasi dirinya, membantu klien memahami dirinya sendiri, membantu klien mengambil tindakan untuk keperluan pencapaian tujuan konseling, dan menilai proses dan hasil konseling

2. Tingkat penerapan konselor tentang berbagai konsep kemampuan profesional konseling seperti tersebut pada butir 1 di atas ke dalam praktek layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
3. Perbedaan tingkat penguasaan konsep kemampuan profesional konseling antara konselor yang berkualifikasi pendidikan S-1 dengan konselor yang berkualifikasi pendidikan D-3.
4. Perbedaan tingkat penerapan konsep kemampuan profesional konseling antara konselor yang berkualifikasi pendidikan S-1 dengan konselor yang berkualifikasi pendidikan D-3.
5. Korelasi dan kontribusi penguasaan konsep kemampuan profesional konseling terhadap penerapan konsep tersebut ke dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
6. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat penerapan konsep kemampuan profesional konseling ke dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Apabila bukti-bukti empirik sebagaimana dikemukakan terdahulu dapat terhimpun melalui penelitian ini maka hasil-hasilnya akan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut.

- a. Sebagai bahan masukan terhadap penyusunan model pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional konselor

sekolah yang ada di lapangan dengan menggunakan pola pendidikan dalam jabatan (in-service training).

1. Sebagai bahan masukan bagi Jurusan PPB Program Studi Bimbingan dan Konseling dalam menyiapkan calon-calon konselor yang profesional di sekolah, khususnya konselor-konselor yang akan bertugas di SMA.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola pendidikan (seperti Kanwil Depdikbud, Kandep, Kepala Sekolah, dan sebagainya) dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan bimbingan di sekolah.

## E. Defenisi Operasional

### 1. Penguasaan Konsep

Istilah konsep dapat dirujuk kepada teori-teori belajar seperti dikemukakan oleh Gagne, (1970), dan sebagainya. Pada dasarnya konsep dapat diartikan sebagai suatu golongan, kategori, kelas atau kelompok dari suatu benda atau peristiwa yang dapat dipelajari oleh seseorang (Gagne, 1970:88-89). Konsep merupakan hasil proses kognitif yang ada pada setiap individu dalam kerangka memahami sesuatu sehingga dia dapat membedakannya dengan hal yang lain. Manfaat konsep ini menurut Nasution (1988:84) adalah agar individu terbebas dari pengaruh stimulus yang spesifik serta dapat digunakannya dalam segala macam situasi dan stimulus yang mengandung konsep tersebut.

Adapun penguasaan konsep yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejumlah pengetahuan dan pemahaman konselor tentang berbagai fakta, metode dan prosedur, prinsip

serta teknik-teknik berkenaan dengan konseling perorangan khususnya menyangkut kemampuan konselor dalam: melibatkan diri sendiri dan klien dalam suasana konseling, membantu klien dalam mengeksplorasi dirinya, memahami dirinya, dan mengambil tindakan, serta kemampuan konselor dalam menilai proses dan menutup konseling ; yang dicerminkan oleh tinggi rendahnya skor yang diperoleh responden berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikannya terhadap alat ukur penguasaan konsep kemampuan profesional konseling.

## 2. Konselor

Istilah konselor menurut Cottle (1973:73) adalah seseorang yang mempunyai latar belakang profesional dalam berbagai ilmu perilaku yang dipersiapkan untuk membantu klien dalam membuat pilihan-pilihan berkenaan dengan perkembangan kehidupan dan karirnya sehingga dapat hidup pada suatu lingkungan masyarakat modern.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konselor adalah tenaga kependidikan yang karena keahliannya diangkat sebagai tenaga kependidikan atau penyelenggaraan pendidikan lainnya untuk menjadi tenaga yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan di sekolah. Kualifikasi pendidikan mereka adalah yang telah menyelesaikan Program Diploma 3 dan/atau Sarjana dalam bidang bimbingan dan konseling.

## 3. Penerapan

Istilah penerapan (application) berasal dari konsep taxonomy ranah kognitif Bloom (1971) yang untuk mendapatkannya perlu didahului oleh pengetahuan dan pemahaman



akan sesuatu. Arends dalam menggambarkan makna aplikasi itu menyatakan bahwa individu dapat menerapkan informasi yang diketahuinya kedalam bentuk tindakan yang konkrit. Selanjutnya Gronlund (1978) juga menyatakan bahwa aplikasi mengacu kepada kemampuan untuk menggunakan materi-materi yang telah dipelajarinya ke dalam situasi baru dan konkrit.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penerapan adalah upaya konselor dalam mempraktekkan berbagai konsep tentang kemampuan profesional konseling khususnya kemampuan dalam melibatkan diri sendiri dan klien dalam suasana konseling, membantu klien dalam mengeksplorasi dirinya, memahami dirinya, dan mengambil tindakan, serta kemampuan konselor dalam menilai proses dan menutup konseling ; yang terungkap melalui tinggi rendahnya skor yang dicapai responden terhadap butir-butir pernyataan alat ukur penerapan kemampuan profesional konseling.

#### **4. Kemampuan Profesional**

Kemampuan dapat dipandang sebagai ability dan compe-  
tence. Bila kemampuan dipandang sebagai ability, Guilford (Klausmeier, 1971:63) mengemukakan : "ability as union of an operation, a content, and a product". Dalam hal ini kemampuan dipandang sebagai suatu kesatuan dari hal-hal yang bersifat operasional, isi (pengetahuan) dari apa yang akan dioperasikan tersebut, dan merupakan hasil dari apa yang dikerjakan. Selanjutnya Burton (1962:98) mendefenisikan ability sebagai " ... is generalized power to carry on integrated complex of related activities". Lebih lanjut

likemukakannya bahwa suatu ability sulit diberi batasan kecuali dalam hal dirinya sendiri. Dia mencontohkannya dengan " ability to read, ability to spell, ability to write".

Bila kemampuan dipandang sebagai masalah kompetensi, Pilburd (1985: 52) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan yang telah ada, kemampuan untuk melakukan sesuatu, termasuk juga kepada kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang termasuk .... dan mana yang tidak termasuk ..... Kompetensi menurut Pilburd itu tampaknya mengandung unsur pemahaman akan sesuatu dan penerapan hal tersebut ke dalam bentuk kegiatan.

Istilah kemampuan juga dapat ditemukan dalam kamus-kamus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:552) kemampuan itu berarti : (1) kesanggupan, (2) kecakapan, (3) kekuatan, dan (4) kekayaan. Sedangkan istilah kompetensi berarti (1) keahlian, kemampuan, dan (2) wewenang (Peter Salim, 1990:372).

Selanjutnya istilah profesional merujuk kepada dua hal, yaitu (1) pada orang yang menyanggah suatu profesi, dan (2) pada penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesinya ( Achmad Sanusi, 1991: 19 dan Dedi Supriadi, 1990:3). Dalam kaitan ini akan terlihat beda antara penampilan seseorang yang profesional dengan yang bukan profesional. Kemampuan yang bersifat profesional harus didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan tertentu serta pada alasan-alasan mengapa pekerjaan seperti itu perlu

dilakukannya untuk kepentingan orang lain. Dalam kaitan ini juga perlu diperhatikan ciri-ciri pekerjaan profesional konselor seperti yang dikemukakan oleh Mc Cully (1969:14), yaitu (1) dapat menampilkan pelayanan sosial yang unik sehingga jelas perbedaannya dengan pekerjaan tenaga lain, (2) untuk mendapatkan kemampuan tersebut diperlukan pendidikan dan latihan dalam periode waktu yang memadai, dan (3) para anggota yang termasuk ke dalam pekerjaan itu secara tegas dituntut memiliki kemampuan minimal melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan, serta sertifikasi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa satu-satunya keunikan pelayanan dari konselor adalah menyelenggarakan konseling perorangan (Mc Cully, 1969:16)

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan kemampuan profesional adalah pemahaman dan keterampilan khusus konselor berkenaan dengan penyelenggaraan konseling perorangan di sekolah sesuai dengan tuntutan profesinya, yaitu dalam hal melibatkan diri sendiri dan klien dalam suasana konseling, membantu klien dalam mengeksplorasi dirinya, membantu klien dalam memahami dirinya sendiri, membantu klien dalam mengambil tindakan untuk keperluan pencapaian tujuan konseling, serta menilai proses dan menutup konseling.

#### **E. Asumsi Penelitian**

Penelitian ini diselenggarakan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut. Pertama, Pada SMA Negeri Kota madia Padang diasumsikan telah dilaksanakan kegiatan layanan

onseling. Asumsi ini didasarkan atas landasan yuridis-formal pelayanan bimbingan dan konseling yang tertuang pada kurikulum 1984. Pada kurikulum tersebut dinyatakan bahwa salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling di SMA adalah layanan konseling.

Kedua, Konseling merupakan inti kegiatan program bimbingan dan konseling. Asumsi ini didasarkan atas pernyataan-pernyataan para ahli seperti dijelaskan pada bagian latar belakang di atas. Didasarkan atas beberapa pandangan ahli tentang bimbingan dan konseling, tampaknya tak satupun yang menolak bahwa layanan konseling merupakan salah satu layanan yang penting dari program bimbingan di sekolah.

Ketiga, Kemampuan profesional konselor dalam menyelenggarakan layanan konseling tidak diperoleh secara alami melainkan memerlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu tertentu. Asumsi ini diperkuat oleh Dyer (1977:18) melalui pernyataannya sebagai berikut.

The counselor cannot merely do what comes naturally, according to his own style". The counselor has learned specific skills and competencies which are employed in counseling for the results they are known to produce.

Keempat, keberhasilan konselor dalam menyelenggarakan layanan konseling secara profesional ditentukan oleh banyak faktor yaitu faktor di dalam diri konselor sendiri seperti : penguasaan metode, teknik, dan keterampilan, yang ditunjang oleh sikap, motivasi, nilai pribadi konselor dan pemaknaan oleh konselor akan tugasnya, dan berbagai faktor yang terdapat di luar dirinya sendiri (Munandir, 1993:12).